

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, bahwa kesimpulan yang dapat diambil dalam penanganan pengendalian dan penyebaran virus Covid-19 perlu dibarengi dengan keikutsertaan pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan sesuai dengan makna dari otonomi daerah yaitu wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang-Undang. Tetapi di Kota Bekasi dalam penanganan pengendalian dan penyebaran Covid-19 pada pengambilan keputusan masih bergantung pada pusat membuat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *agile governance*, lalu tidak adanya struktur organisasi Satgas Covid-19 Kota Bekasi pada laman website [corona.bekasikota.go.id](https://corona.bekasikota.go.id), dimana seharusnya didalam website tersebut memuat segala informasi terkait Covid-19 dan Satgas Covid-19 Kota Bekasi secara lengkap agar masyarakat tidak kesulitan dalam mencari informasi terkait Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian analisis *agile governance* dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bekasi ditemukan bahwa tidak adanya urgensi atau alur yang jelas dari Satgas Covid-19 ini didasarkan pada ketika peneliti ingin menemui pihak Satgas Covid-19 Kota Bekasi tetapi telah dibubarkan. Lalu terkait Rumah Sakit yang dijadikan sebagai Rumah Sakit

rujukan bagi pasien Covid-19, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat yang positif Covid-19 yang dalam keadaan darurat baik dari tingkat Kecamatan, Kelurahan serta RT dan RW mengenai Rumah Sakit rujukan. Walaupun dalam hal vaksinasi Kota Bekasi terlihat sangat baik terlihat dari aktifnya Walikota Bekasi dalam menggelar vaksinasi gratis seperti yang telah dilakukan di beberapa tempat, yaitu: di pusat perbelanjaan, di sekolah dan kampus, puskesmas, klinik posyandu dan dengan mitra swasta lainnya. Vaksinasi di Kota Bekasi dosis pertama berdasarkan pada NIK sebesar 96.11% (1.937.538 orang) data tersebut berdasarkan laporan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Transformasi Ekonomi Kota Bekasi pada 27 Maret 2022. Untuk dosis kedua berada pada persentase 82.83% (1.669.885 orang) dan untuk dosis ketiga dengan kisaran 16.37% (330.075 orang).

## **5.2 Rekomendasi**

Penulis menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan terkait hasil penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat rekomendasi yang disajikan dalam dua bagian, yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis. Adapun rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut:

### **5.2.1 Rekomendasi Akademik**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penambahan referensi keilmuan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian Ilmu Politik dan

kajian mengenai penanganan Covid-19 di Kota Bekasi dengan Prinsip *Agile Governance*.

2. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau penelitian lanjutan atas topik yang sama serta peneliti lain dapat mengadakan penelitian lanjutan dengan teori-teori dan metodologi yang berbeda guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.
3. Bagi Universitas Islam “45” Bekasi semoga dengan hasil penelitian ini menghasilkan sebuah khazanah Ilmu Administrasi Negara yang bermanfaat bagi banyak pihak terutama untuk mahasiswa dan para dosen agar dapat melaksanakan penelitian yang lebih baik untuk kedepannya.

### **5.2.2 Rekomendasi Praktis**

1. Pemerintah Kota Bekasi seharusnya mampu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dikarenakan situasi pandemi Covid-19 ini yang menyebar dengan sangat cepat. Pemerintah Kota Bekasi belum mampu menerapkan *agile governance* dalam penanganan Covid-19 didasarkan atas tidak adanya urgensi dan alur yang belum jelas pada Satgas Covid-19 Kota Bekasi dikarenakan Satgas Covid-19 Kota Bekasi sudah lebih dulu dibubarkan padahal kasus Covid-19 masih meluas.
2. Tidak ada nya kolaborasi antara Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW dalam hal sosialisasi mengenai informasi Rumah Sakit

rujukan bagi pasien Covid-19, tidak ada perlengkapan instrumen atau pedoman dan alat peraga dalam mensosialisasikan informasi mengenai Rumah Sakit rujukan pasien Covid-19 kepada masyarakat yang sangat membutuhkan atau masyarakat yang dalam keadaan kritis.

3. Bagi Satgas Covid-19 Kota Bekasi seharusnya mampu bergerak cepat dan tanggap sesuai dengan prinsip *agile governance* yang dirasa cukup baik karena adanya perubahan lingkungan yang memerlukan ketangkasan dan *agile* dalam penanganan Covid-19 di Kota Bekasi. Satgas Covid-19 seharusnya bisa terus berjalan dan tidak dibubarkan keorganisasiannya hanya karena kasus pasien terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi mengalami penurunan. Tidak ada keurgensian dan alur organisasinya masih belum jelas tidak ada struktur organisasi dari Satgas Covid-19 ketika masyarakat mengakses laman resmi [corona.bekasikota.go.id](https://corona.bekasikota.go.id).